

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press), 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pegantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press), 2012.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta), 2008.
- Esti Nuringdyah, Khairul Fahmi dan DKK, “*Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga*”, (Bandungan Hilir: Pustakan Masyarakat Setara), 2013.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT.Alumni), 2004.
- Karim, M. Rusli. *Pemilu demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), 1991.
- Latif, Abdul. *Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: CV. Kreasi Total Media), 2007.
- M.D, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media), 1999.
- M.D., Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawalipress), 2011.
- Mahmuzar, *Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan*, (Bandung; Penerbit Nusa Media), 2019.
- Mansyur, Effendi A. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM*, (cet,pertama, Bogor), 2005
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media), 2011.
- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2013.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1986.
- Soemiro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press), 2013.

- Suhartono (Edi), Didit Hariadi Estiko. *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, (Jakarta: P31 Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi), 2003.
- Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung:Pusaka Setia), 2009.
- Tambunan, A.S.S. *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD*, (Bandung: Binacipta), 1986.
- Taufani Galang, Suteki. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 2018.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Pertama), 2010.
- Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2012

JURNAL

- Adidarma, Caka. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Bagi Calon Kepala Daerah Daerah Berstatus Mantan Terpidana Korupsi Dipilih Kembali Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020” (2022)
- AFIFAH, ZAHRA, Untung Sri Hardjanto, and Diastama Anggita Ramadhan. “ANALISIS PUTUSAN MK NO. 56/PUU-XVII/2019 MENGENAI MASA TUNGGU MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK DAPAT MENGAJUKAN DIRI MENJADI CALON KEPALA DAERA_078 HTN 2022.” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022
- Amir, Mushaddiq. “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–131.
- Aspani, Budi. “Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 15 Nomor 03, (September 2017).
- Hamdi, Akhmad Nikhrawi. Hak Eks Narapidana menjadi anggota legislatif, *fisip, Jurnal as-Siyasah Universitas Islam Kalimantan MAB*, Banjarmasin, vol. 1 No. 1. 2016, 29.
- Handayani, Yeni. “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Rechts Vinding*, 2014, 1, <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/1734/1315>
- Ismail, “Pengusungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Bentuk Representasi Daerah” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 Nomor 1 (April 2020).

- Jaya, Reki Putera. "SYARAT PUBLIKASI DI MEDIA MASSA BAGI CALON PERSEORANGAN YANG BERSTATUS MANTAN TERPIDANA PADA PEMILU TAHUN 2024 DI INDONESIA." *Jurnal Bawaslu DKI* 8, no. 1 (2023): 29–45
- Jaya, Reki Putra. "Publikasi di Media Masa Bagi Calon Perseorangan Yang Berstatus Mantan Terpidana Pada Pemilu Tahun 2024 di Indonesia", *Jurnal bawaslu DKI Jakarta*, Vol.8 Nomor 1, 2023, 30, <http://www.jurnal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/issue/view/33>
- Jufri, Muhammad. "KONSTITUSIONALITAS CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI", *Jurnal bawaslu DKI Jakarta* Vol 8 No. 1, 2023, 59, <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/296/221>
- Jufri, Muhammad. "Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Bawaslu DKI* 8, no. 1 (2023): 47–68.
- Kartono, Politik Hukum Judicial Review di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, 2011, 18.
- Lubis, Salim Fazui, dkk, "Pengaturan Hukum Calon Legislatif Mantan Narapidana", *Jurnal Rectum* Vol 2 No. 1, 2020, 39
- Mukarromah, Izzatul, and Ayon Diniyanto. "Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu Manabia : Journal of Consitutional Law" Vol. 03. No.2, (Dec 2023)
- Muliawan, Delimukti Putra. "ANALISA PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." WEBINAR HAK UJI MATERIIL PADA BAB PENJELASAN UNDANG-UNDANG LANDASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (2023).
- Munawwir, Yusron. "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 116–137.
- Munawwir, Yusron. "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 116–137.
- Nggilu, Novendri M, Dian Ekawaty Ismail, Tri Sulistyowati, and Mohamad Rivaldi Moha. "Constitutional Crisis: Intensifying Disobedience to the Decisions of the Indonesian Constitutional Court." *Revista Chilena de Derecho* 50, no. 2 (2023): 115–132.
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyoyo. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 95–104.

- Posner, Richard A. "The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint." *Legal Methods* (2021): 1.
- Qamar, Nuruk. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.1, No,1, (November 2012).
- Siallagan, Haposan. "Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang", *Mimbar Hukum* Vol.22 No.1, 2010.
- Sipangkar, Lenny M.L. "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, Nomor 3 (September 2016).
- Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.1, (Maret 2014).
- Wuryaningrum, Shinta. "Nalisis Melalui Pendekatan Judicial Activism Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/Puu-Xxi/2023 tentang Syarat Mantan Narapidana Yang Akan Mencaalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Dpd." Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan Dan Akibat Hukumnya (2023).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kostitusi.
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
 Peraturan KPU Nomor Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota"
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2024

WEBSITE

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> di <https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>, diakses 20 November 2023, oleh Humas DPD RI.

<https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>, diakses 20 November 2023, oleh Humas DPD RI.

Sabhani, Agus. *Tiga Syarat Mantan Terpidana Boleh Menjadi Calon Anggota Legislatif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-syarat-mantan-terpidana-boleh-menjadicalon-anggota-legislatif-lt638a4b26dab4c/>, diakses 2 November 2023.

Rico Afrido, “Irman Gusman Kembali Terjun Ke Politik, Tokoh Sumbar Bicara Peluangnya”, <https://nasional.sindonews.com/read/1018685/12/irman-gusman-kembali-terjun-ke-politik-tokoh-sumbar-bicara-peluangnya-1675940554>, diakses Minggu, 24 Maret 2023 Pukul 13:23 WIB diakses Minggu, tanggal 22 November 2023 jam 14.44 WIB